



BAB IV

TINJAUAN WILAYAH

4.1. KONDISI WILAYAH D.I.YOGYAKARTA

4.1.1. Kondisi Administratif

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².



Gambar 4.1. Peta Provinsi D.I.Yogyakarta

Sumber : petatematikindo.wordpress.com (2014)

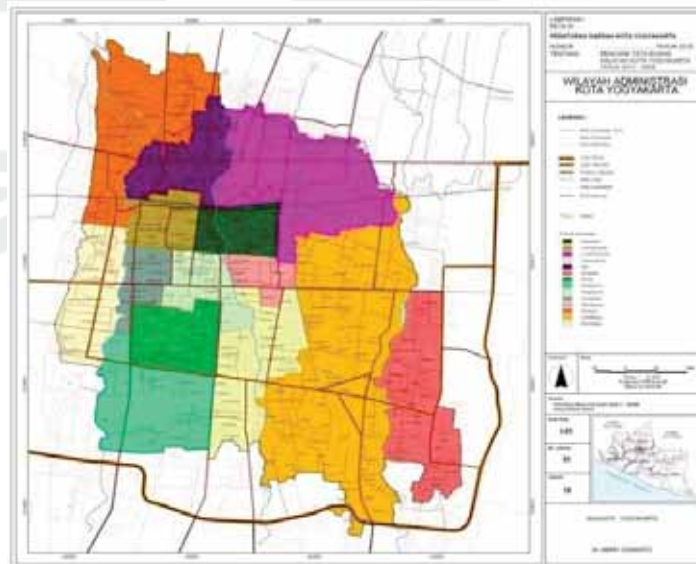


4.1.1.1. Pembagian Administratif

Kota Yogyakarta dibagi oleh 14 kecamatan yang tersebar di seluruh daerah Kota Yogyakarta. 14 kecamatan yang tersebar di Kota Yogyakarta yaitu : 1)Mantrijeron, 2)Keratin, 3)Mergangsan, 4)Umbulharjo, 5)Kotagede, 6)Gondokusuman, 7)Danurejan, 8)Pakualaman, 9)Gondomanan, 10)Ngampilan, 11)Wirobrajan, 12)Gedongtengan, 13)Jetis, 14)Tegalrejo.

4.1.2. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga (Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan).



Gambar 4.2. Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Sumber : petatematikindo.wordpress.com (2014)



Adapun batas-batas administratif Yogyakarta adalah:

- a. **Utara:** Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- b. **Timur:** Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- c. **Selatan:** Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- d. **Barat:** Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$.

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama.

4.1.2.1. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan kurang lebih 1



derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

- a. Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
- b. Bagian tengah adalah Sungai Code
- c. Sebelah barat adalah Sungai Winongo

4.1.2.2. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km².

4.1.2.3. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan)

4.1.3. Kondisi Klimatologis

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 0,00 mm – 346,2 mm per hari dengan hari



hujan per bulan antara 0,00 – 25,0 kali yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2009 menunjukkan angka 26,66° C lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2008 yang tercatat sebesar 26,11 ° C, dengan suhu maksimum 37,9° C pada bulan Oktober 2009 dan suhu minimum 18,2° C pada bulan Juli 2009. Sedangkan kelembaban udara tercatat 27 – 96 persen, tekanan udara antara 1.006,0 mb – 1.014,8 mb. Angin pada umumnya bertiup angin muson yang mana pada musim hujan bertiup angin muson barat daya bersifat basah , pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah angin antara 60 ° - 300° dan kecepatan angin maksimum 43 knot.

4.1.4. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2011, jumlah penduduk Provinsi DIY tahun 2011 tercatat sebanyak 3.487.325 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 48,57% atau sebanyak 1.696.310 jiwa dan penduduk perempuan 51,43% atau 1.791.051 jiwa. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Provinsi DIY tercatat 1.085 jiwa per km². Kota Yogyakarta yang mempunyai luas wilayah terkecil (1,02%) memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 11.958 jiwa per km².

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Provinsi D.I.Yogyakarta

Tahun	2011	2010	2009	2008	2006
Jumlah Pria (jiwa)	1.696.310	1.708.910	1.705.404	1.716.215	1.247.162
Jumlah Wanita (jiwa)	1.791.015	1.748.581	1.746.986	1.752.287	1.260.595



Lanjutan Tabel 4.1.

Tahun	2011	2010	2009	2008	2006
Total (jiwa)	3.487.325	3.457.491	3.452.390	3.468.502	2.507.757
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	1	100	-	2
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1.085	1.085	1.099	1.089	787

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2011

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten –
kabupaten, D.I.Yogyakarta**

REGION	KATEGORI	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				
		2011	2010	2009	2008	2006
Bantul	Jumlah Pria (jiwa)	461.524	454.491	453.981	414.046	402.970
	Jumlah Wanita (jiwa)	459.739	457.012	456.591	428.010	417.571
	Total (jiwa)	921.263	911.503	910.572	842.056	820.541
Gunungkidul	Jumlah Pria (jiwa)	320.006	326.703	326.227	335.013	328.002
	Jumlah Wanita (jiwa)	357.992	348.679	348.181	351.759	355.442
	Total (jiwa)	677.998	675.382	674.408	686.772	683.444
Kulonprogo	Jumlah Pria (jiwa)	190.761	190.694	190.550	181.470	183.464
	Jumlah Wanita (jiwa)	199.446	198.175	198.205	193.313	190.376
	Total (jiwa)	390.207	388.869	388.755	374.783	373.840
Sleman	Jumlah Pria (jiwa)	534.644	547.885	545.980	532.905	-
	Jumlah Wanita (jiwa)	572.660	545.225	544.587	507.315	-
	Total (jiwa)	1.107.304	1.093.110	1.090.567	1.040.220	-
Yogyakarta	Jumlah Pria (jiwa)	189.375	189.137	188.666	220.827	214.526
	Jumlah Wanita (jiwa)	201.178	199.490	199.422	236.088	227.683
	Total (jiwa)	390.553	388.627	388.088	456.915	442.209
TOTAL	Jumlah Pria (jiwa)	1.696.310	1.708.910	1.705.404	1.684.261	1.128.962
	Jumlah Wanita (jiwa)	1.791.015	1.748.581	1.746.986	1.716.485	1.191.072
	Total (jiwa)	3.487.325	3.457.491	3.452.390	3.400.746	2.320.034

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2011

Dilihat dari persebaran penduduk di Provinsi DIY pada tahun 2011, jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.107.304 juta jiwa atau sebesar 31,62%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 921.263 ribu orang atau



26,36%, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 677.998 ribu orang atau 19,53%, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 390207 ribu orang atau 11,25%. Sementara jumlah penduduk terendah berada di Kota Yogyakarta sebanyak 390.553 ribu orang atau 11,24%.

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Yogyakarta, dengan jumlah penganut Kristen dan Katolik yang relatif signifikan. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat.

Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga saat ini, Pengurus Pusat Muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

4.1.5. Norma dan/ Atau Kebijakan Otoritas Wilayah Terkait

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya adalah wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang bergabung dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, sejak ditetapkan sebagai sebuah Daerah Otonom sudah dinyatakan sebagai sebuah Daerah Istimewa yang ditetapkan melalui “*Piagam Kedudukan*” Sri Paduka



Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.

Tabel 4.3. Amanat Pendiri Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman

AMANAT SRI PADUKA INKENG SINUWUN KANGJENG SULTAN	AMANAT SRI PADUKA KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM
<p>Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya. Bahwa berhubung antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintahan Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. <p>Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.</p> <p>Ngajogjakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 Atau 5-9-1945 HAMENGGU BUWONO IX</p>	<p>Kami Paku Alam VIII, Kepala Negeri Paku-Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa Negeri Paku-Alaman, yang bersifat Kerajaan adalah daerah-istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku-Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku-Alaman mulai saat ini di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya. Bahwa perberhubungan antara Negeri Paku-Alaman dengan Pemerintahan Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. <p>Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku-Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.</p> <p>Paku-Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 Atau 5-9-1945 PAKU ALAM VIII</p>

Sumber : Wikipedia

Pada tahun 1948, Pemerintah Pusat mulai mengatur pemerintah daerah dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah yang memberi ruang keistimewaan bagi Yogyakarta. Sebagai sebuah daerah istimewa, DIY secara formal dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950. Keduanya berlaku mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950.



UU No. 3 Tahun 1950 hanya terdiri dari tujuh pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi. UU tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. Dalam UU No. 3 Tahun 1950 disebutkan Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Popinsi --bukan sebuah Provinsi

UU No. 19 Tahun 1950 adalah perubahan dari UU No. 3 Tahun 1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1948.

4.1.5.1. Konsep Otonomi Khusus

Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari jaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan, mulai dari VOC, Belanda, Inggris, dan Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda, status tersebut disebut sebagai *Zelfbestuurende Lanschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti*. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negara) sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya.

4.1.5.2. Alasan Keotonomian

RUU mengedepankan lima alasan perlunya keistimewaan DIY dalam konteks sebuah kawasan berotonomi khusus, yaitu alasan filosofis, kesejarahan-politis, yuridis, sosio-psikologis, dan akademis-komparatif.

Alasan filosofis yang diangkat pada status istimewa pada Provinsi D.I.Yogyakarta tidak serta merta akibat dari pengaruh



filosofi kemasyarakatan ataupun filosofi sejarah saja, namun juga pada filosofi pendiri D.I.Yogyakarta yakni Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang mau membuat Yogyakarta menjadi satu dari bagian Republik Indonesia serta kontribusi dalam melindungi simbol bangsa di masa awal kemerdekaan.

Alasan kesejarahan yang diangkat adalah bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya, terutama dalam kaitannya dengan kelangsung hidup Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi NKRI, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam mengisi visi ke-Indonesia-an secara lebih konkret.

Dalam alasan yuridis, disebutkan bahwa geneologis predikat keistimewaan Yogyakarta di tataran yuridis formal, dapat dirujuk pada pada Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam.

Alasan sosio-psikologis disebutkan bahwa ada keinginan kuat mayoritas warga untuk tetap mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta yang, antara lain, terekam melalui respon masyarakat terhadap pengisian jabatan Gubernur pada tahun 1998. Sebagian masyarakat mengekspresikan aspirasinya secara demonstratif melalui berbagai kelompok yang berujung pada keluarnya Maklumat Rakyat Yogyakarta 26 Agustus 1998. Salah satu butir penting Maklumat ini adalah bahwa rakyat tetap berkeinginan mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1950. Dari sudut pandang sosiologis,



peristiwa ini juga mencerminkan kuatnya hubungan antara Sultan sebagai simbol pimpinan sosio-kultural Jawa dengan masyarakat Yogyakarta yang menginginkannya sebagai Gubernur yang akan memimpin roda pemerintahan di DIY.

4.1.6. Kondisi Elemen – Elemen Kawasan

Kota Yogyakarta (bahasa Jawa: Hanacaraka) adalah salah satu kota besar di Pulau Jawa yang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus tempat kedudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam. Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara 1575-1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman, yang merupakan pecahan dari Mataram.

Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan berbagai macam jenis pariwisatanya, dan Yogyakarta memiliki beberapa landmark yang tidak hanya terkenal, tetapi juga mempunyai cerita dan sejarah yang menarik untuk diketahui. Mulai dari Titik Nol Km, hingga Pojok Beteng Keraton Yogyakarta Landmark adalah tempat atau bangunan yang khas, hanya terdapat di suatu kota dan tidak ditemukan atau terdapat di kota lain.

Tempat atau bangunan-bangunan tersebut menjadi ciri khas kota dan bahkan menjadi penanda identitas kota. Demikian pula Yogyakarta. Salah satu landmark yang paling terkenal adalah Tugu Jogja yang menjadi lambang kota Jogja. Tugu yang didirikan 3 abad yang lalu. Tugu Jogja menjadi identitas yang kuat bagi kota Jogja.

Titik Nol Kilometer yang berada tepat di tengah-tengah perempatan Kantor Pos Besar dapat dikatakan sebagai pusat kota, ruang publik besar atau mass open space. Titik Nol Kilometer berada di utara Alun alun Lor dan Keraton Yogyakarta. Banyak kegiatan besar diadakan ditempat ini mulai dari demo atau unjuk rasa hingga acara budaya dan konser musik.



Keraton Yogyakarta tentunya menjadi landmark kota yang menarik. Keraton Yogyakarta menarik karena mempunyai bangunan dengan gaya arsitektur yang unik dengan perpaduan berbagai gaya seperti arsitektur Jawa, Arab, Cina, hingga arsitektur kolonial. Selain itu bangunan keraton sangat besar, sangat luas, hingga disebut sebagai kompleks Keraton Yogyakarta.

Di depan Keraton Yogyakarta terdapat Alun-alun Lor (utara) salah satu landmark penting bagi kota Yogyakarta. Sejak berdirinya Keraton Yogyakarta, Alun-alun Lor telah memainkan perannya sebagai ruang publik utama kota Yogyakarta. Pada masa lalu Alun-alun utara menjadi tempat diadakannya "rampogan", pertarungan manusia dan harimau. Setiap tahun sekali diadakan Pasar Malam Sekaten selama satu bulan. Karena tempatnya yang luas, konser-konser musik besar juga sering diadakan di tempat ini.

Sedangkan landmark kota Jogja yang sangat terkenal adalah Malioboro, ruas jalan membujur utara - selatan yang berada tepat di utara Keraton Yogyakarta. Malioboro konon berasal dari kata "malyabara" yang artinya jalan dengan untai bunga di kiri dan kanan jalan. Memang dahulu setiap tamu yang akan menuju Keraton Yogyakarta selalu melewati jalan ini. Saat ini Malioboro menjadi pusat kunjungan wisatawan ke Jogja, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

4.1.7. Kondisi Sarana Prasarana

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan kota merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumber daya air dan pelayanan air bersih, jaringan air limbah serta sarana dan prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Berkurangnya kualitas infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur akan memperlambat perekonomian daerah.



Dilain pihak, pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dapat digunakan untuk mendukung kelengkapan standar pelayanan minimal lingkungan yang berkelanjutan seperti ketersediaan air bersih, jalan lingkungan, saluran drainase, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan sosial serta fasilitas ekonomi lokal.

4.1.7.1. Jalan

Kapasitas jalan dan kemampuan jalan di beberapa ruas jalan sudah melebihi kapasitas, hal ini nampak dari terjadinya antrian panjang dan diperberat adanya parkir pada badan jalan serta sulit memperlebar jalan karena adanya keterbatasan lahan. Kondisi jalan yang rusak dan bergelombang bahkan pada jalan protokol membuat kesulitannya pengguna jalan dan angka kecelakaan di jalan masih tinggi.

4.1.7.2. Drainase

Jaringan drainase di Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaan yogyakarta, karena dinamika perubahan penggunaan lahan yang terjadi kiranya dimensi dan sistem drainase yang ada saat ini perlu penyesuaian melalui penyempurnaan sistem jaringan drainase perkotaan yogyakarta yang mencakup batas administrasi Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Sleman dan Bantul.

Sarana Drainase untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta meliputi drainase utama berupa Sungai Gadjahwong, Sungai Winongo dan Sungai Code, saluran drainase sekunder (pembawa) tertutup, saluran drainase sekunder (pembawa) terbuka, saluran tersier (pengumpul) tertutup, saluran tertier (pengumpul) terbuka. Seluruh



sirkulasi drainase disalurkan menuju ke saluran drainase utama berujud ketiga sungai diatas.

Permasalahan timbulnya genangan bahkan banjir di musim hujan tidak hanya disebabkan belum sempurnanya sistem sirkulasi drainase yang ada namun juga dapat diakibatkan oleh tersumbatnya aliran akibat pembuangan sampah atau kurang sempurnanya tangkapan air bahkan dimungkinkan akibat curah hujan yang sangat tinggi. Saluran drainase selain memerlukan pemeliharaan fisik juga perlu adanya kegiatan pelumpuran atau membersihkan saluran drainase dari endapan lumpur.

4.1.7.3. Penerangan Jalan Umum

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km², terbagi dalam 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, sebagai Ibukota Propinsi DIY, mempunyai 467 ruas jalan dengan panjang 441.231 km yang dilayani LPJU non kampung.

Pemerintah Kota melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2001 sudah melaksanakan program efisiensi penggunaan energy lampu penerangan jalan umum dengan tujuan :

- a. Penghematan pemakaian energi listrik.
- b. Menjaga Kontinuitas Nyala Lampu/Sistem.
- c. Meratakan titik Penerangan Jalan Umum.
- d. Menambah volume Lampu Penerangan Jalan Umum
- e. Menghemat biaya Pembayaran Rekening Listrik.
- f. Menghemat biaya operasional dan pemeliharaan
- g. Meningkatkan dan menunjang wisata malam hari.
- h. Mengurangi emisi CO₂ dari penggunaan energi listrik.



4.1.7.4. Jaringan Air Kotor/Limbah

Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riol menuju IPAL Sewon dan mencakup pelayanan kurang lebih 25% penduduk kota, sedangkan bagi penduduk yang wilayahnya tidak terjangkau oleh jaringan air limbah Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Septic Tank Komunal. Septic Tank Komunal dimaksudkan untuk mengolah air limbah domestik maksimal untuk 5 orang KK sedangkan IPAL Komunal dimaksudkan untuk mengolah air limbah domestik minimal dari 50 KK.

Pembangunan dengan sistem komunal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan yang ada di Kota Yogyakarta dan juga karena air tanah yang sudah tercemar. Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riol menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon dan mencakup pelayanan kurang lebih 25% penduduk kota, sedangkan lainnya menggunakan sistem setempat yaitu menggunakan septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan limbah dari tiap persil rumah tangga.

Saat ini dikembangkan pembuangan sistem komunal bagi lokasi permukiman yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan air kotor limbah seperti di dekat bantaran sungai. Sistem komunal ini merupakan pengolahan limbah sederhana berupa bak-bak pengendapan dan sumur peresapan. Penggunaan sistem komunal digunakan untuk pembuangan dari suatu kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga (untuk septic tank maksimal 5 KK dan untuk



IPAL Komunal minimal 6 KK). Sistem ini dirasa lebih efektif untuk pemukiman penduduk di Kota Yogyakarta yang tidak dapat terjangkau oleh jaringan air limbah dan lahan terbatas yang dimiliki oleh penduduk. Pembangunan dengan sistem komunal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan yang ada di Kota Yogyakarta dan juga karena air tanah yang sudah tercemar oleh bakteri E. Colli. Hingga saat ini jaringan air limbah yang ada berupa sambungan rumah 14.509 unit.

Untuk penggelontoran saluran air kotor Pemerintah Daerah memiliki satu bendung di Sungai Winongo bendung Bendolole, Sungai Code dan suplai dari Selokan Mataram dari Sungai Belik. Pelayanan air limbah secara bertahap akan ditingkatkan melayani 53% wilayah perkotaan Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 atau melayani 237.000 penduduk.

Di Kota Yogyakarta digunakan 3 (tiga) sistem pengolahan air limbah domestic yang meliputi:

a. Sistem Terpusat / *Off Site*

Pengelolaan air limbah domestik dimana air limbah dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju satu instalasi pengolahan (IPAL Sewon)

b. Sistem Komunal

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem septick tank komunal.

c. Sistem Individual / *On site*

Air limbah domestik langsung diolah disumbernya (dengan septic tank individual).

Sistem terpusat akan menjangkau \pm 1250 hektar daerah pelayanan atau 110.000 penduduk dengan jumlah titik



sambungan 10.400 SR (Sambungan Rumah). IPAL Sewon terletak di Kabupaten Bantul \pm 6 km sebelah barat daya pusat Kota Yogyakarta, dengan luas lahan 6,7 Ha. IPAL ini terletak di Dusun Cepit, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapasitas IPAL Sewon :

- a. IPAL Sewon dioperasikan dengan efisiensi pengolahan yang tinggi (95%).
- b. Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain, yaitu 10.000 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan.
- c. Cakupan pelayanan IPAL Sewon : seluruh Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman bagian selatan (5 Kecamatan) dan sebagian Kabupaten Bantul bagian utara (3 Kecamatan).
- d. Pelayanan IPAL akan ditingkatkan secara bertahap sampai tahun 2012 diharapkan dapat melayani 59 % wilayah perkotaan Yogyakarta atau 273.000 penduduk (53 % penduduk kota).

4.1.7.5. Jaringan Air Bersih

Potensi sumber daya air yang menonjol berasal dari curah hujan dan air tanah. Karena pengaruh kondisi dan struktur geologis yang bervariasi, maka potensi air tanah tidak merata. Daerah-daerah yang mempunyai potensi air tanah meliputi daerah lereng vulkan Merapi, daerah endapan vulkanik, dan daerah pantai selatan. Sedangkan daerah yang potensi air tanahnya kecil terdapat di daerah perbukitan. Tangkapan hujan (*recharge area*) berada di lereng Gunung Merapi. Kondisi air tanah yang ada bersifat tertekan dan tidak tertekan. Pada saat ini penduduk



memanfaatkan air tanah yang tertekan dengan cara pembuatan sumur dangkal. Dengan melihat kondisi air tanah yang ada, maka sumber daya air cukup potensial, sehingga masyarakat cukup mudah memperoleh air non-perpipaan.

Prasarana air bersih cukup banyak mengalami masalah-masalah kualitas air yang disebabkan oleh prasarana kota lainnya. Dalam hal ini sumber-sumber air bersih baik sumur gali maupun perpipaan tercemar kualitasnya akibat manusia, baik dari perkembangan industrinya maupun oleh kotoran manusia (air buangan). Kualitas air non-perpipaan (sumur dangkal) tidak memenuhi persyaratan sebagai air minum, karena kandungan bakteri coli mencapai 240 MPN/ml, meskipun secara fisik dan kimia memenuhi persyaratan.

4.1.7.6. Persampahan

Pengelolaan sampah di wilayah Kota Yogyakarta dengan mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/Transfer Depo dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. Pola pembuangan sampah yang ada saat ini masih menggunakan pola lama, yaitu kumpul – angkut – buang. Tingkat pelayanan pengelola sampah sistem terpusat sebanyak 83%. Jumlah sampah pada tahun 2005 kurang lebih 1.567 m³/hari. Dengan sarana dan prasarana persampahan yang ada jumlah sampah yang dapat dibuang ke TPA kurang lebih 1.375 m³/hari atau sebesar 87,75% dari volume sampah. Karena adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta sehingga tidak mempunyai lokasi untuk TPA. Untuk mengatasi hal tersebut diadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai lahan pembuangan



akhir sampah yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA Piyungan Bantul ini menerima pembuangan sampah dari 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta dari Kota Yogyakarta. Prosentase pembuangan sampah yang terbesar pada TPA Piyungan tersebut berasal dari Kota Yogyakarta. Mekanisme pembiayaan pemeliharaan TPA ini dengan cara sharing dana Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Propinsi Di Yogyakarta dengan melibatkan Sekretariat bersama Kartamantul.

4.2. PEMILIHAN LOKASI

4.2.1. Kriteria Pemilihan Lokasi

Kriteria bangunan wisma atlet dan training center bisa diklasifikasikan dalam beberapa point yakni :

a. Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan yang cukup sulit untuk sirkulasi kendaraan didalam area bangunan dan lahan parkir menjadi masalah, sehingga perlunya pertimbangan luas lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan area parkir, area terbangun, dan area terbuka.

b. Aksesibilitas

Pemilihan lokasi yang memiliki lebar jalan cukup untuk sirkulasi kendaraan khususnya bis (jalan sekunder). Pemilihan lokasi yang dekat dengan stadium agar aksesibilitas ke stadium lebih mudah dan dekat.

c. Lingkungan

Keberadaan tempat yang terletak dilingkungan yang sehat dapat membantu meningkatkan kualitas bangunan yang akan dirancang. Kebutuhan akan bangunan berlantai lebih dari 3, sehingga untuk persyaratan KLB perlu dipertimbangkan.



d. Daya Tarik

Daya tarik untuk menjadikan bangunan sebagai pusat pelatihan maupun menarik minat masyarakat dan mudah diingat adalah keberadaannya yang berada di jalur kota atau yang berada berdekatan dengan landmark kota maupun landmark wilayah.

e. Daya Dukung

Berdekatan dengan bangunan yang memiliki fungsi supportif adalah pilihan terbaik seperti stadion.

4.2.2. Lokasi Terpilih

Berdasarkan kriteria yang di atas, maka terpilih 1 site yang cocok sebagai rencana pembangunan wisma atlet dan training center sepak bola yakni :

- Kawasan Jalan Andung disamping Stadion Mandala Krida, Yogyakarta



Gambar 4.3. Peta Kawasan Jalan Andung

Sumber : Google Earth

4.2.3. Potensi Site Terpilih

Potensi yang terdapat pada site yang terpilih adalah dekatnya dengan stadion utama masyarakat Yogyakarta ini dapat mempengaruhi kedekatan antara supporter dengan pemain sepak bola kesayangan warga Yogyakarta. Dengan kedekatan ini maka



dapat mempengaruhi performa dari pemain dan semangat bertanding menjadi lebih baik lagi.



Gambar 4.4. Jarak Site Dengan Stadion Mandala Krida

Sumber : Analisis Penulis (2014)

Tidak hanya kedekatan dengan supporter namun pada akses menuju ke stadion untuk berlatih maupun bertanding menjadi lebih dekat tanpa harus menaiki kendaraan untuk menuju ke stadion utama.

Area yang bersih dan masih segar nya udara lingkungan jalan andung membuat kualitas pemain dalam beristirahat maupun berlatih semakin baik. Kualitas udara yang baik akibat masih hijau nya area sekitar ste terpilih, aktifitas kendaraan yang lalu lalang juga tidak padat, hanya pada jam jam tertentu saja.



Gambar 4.5. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta

Sumber : RTRW Kota Yogyakarta (2011)



Site ini juga terpilih karena terdapat permasalahan pada pengadaan fasilitas sepak bola untuk tim sepak bola Yogyakarta (PSIM), sejak berdirinya PSIM di Yogyakarta PSIM hanya menumpang untuk mendapatkan fasilitas menginap, hal ini membuat site yang paling dekat dengan stadion menjadi pilihan.

Sejarah site terpilih juga dapat mendukung daya tarik masyarakat untuk mencintai sepak bola di Yogyakarta, ini dikarenakan pada site terdapat sebuah monumen sejarah sepak bola di Indonesia yakni monumen PSSI pertama kali, ini dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan mengenali sepak bola dan sejarahnya. Semakin banyak minat masyarakat terhadap sepak bola maka pundi – pundi keuangan PSIM akan semakin baik dan dapat membantu pengembangan pemain serta fasilitas yang ada.

4.2.4. Ukuran Site

Site yang terpilih adalah site bekas dari markas PSIM itu sendiri dengan luasan $\pm 4500 \text{ m}^2$, terdapat dua site yaitu site utama sebagai markas PSIM dan site penunjang yakni site Stadion Mandala Krida



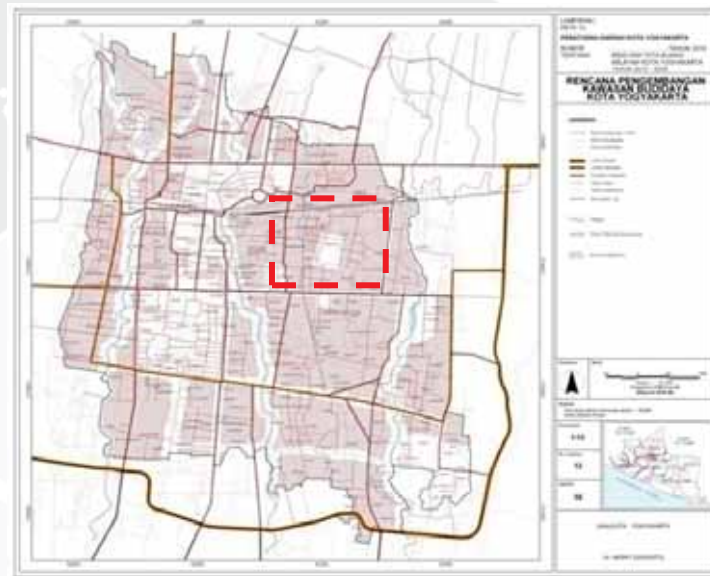
Gambar 4.6. Ukuran Site Utama dan Site Penunjang

Sumber : Analisis Pribadi (2014)



4.2.5. Peraturan Daerah

Site terpilih termasuk dalam kawasan budidaya dengan Peraturan akan tinggi bangunan, KLB (koefisien lantai bangunan), dan KDB (koefisien dasar bangunan) yang tertera pada RTRW wilayah Kota Yogyakarta.



Gambar 4.7. Peta Kawasan Budidaya Kota Yogyakarta

Sumber : RTRW Kota Yogyakarta (2011)



Tabel 4.4. Tabel Peraturan dan Peletakan Bangunan Kota Yogyakarta

Kawasan	Peruntukan Pemanfaatan Ruang		Keterangan			Ketinggian (jml. lantai)
			KDB maks (%)	KLB maks	KDH min (%)	
1	2		4	5	6	7
KAWASAN BUDIDAYA	Perumahan & Permukiman	Fungsi Hunian	80	1,5	10	3
		Fungsi Campuran	70	≤ 4,0	10	3
		Konominium/ Apartemen/ Flat	60	≤ 4,0	20	7
	Fasilitas Umum & Sosial	Pendidikan (TK- SLTA)	70	≤ 4,0	20	3
		Universitas/ Akademi	70	≤ 4,0	20	6
		Kesehatan	70	≤ 4,0	20	4
		Keagamaan	70	≤ 4,0	50	2
		Perkantoran Pemerintahan	70	≤ 4,0	20	5
	Perdagangan & Jasa	Pusat Perbelanjaan Moderen/ Mall	70	≤ 4,0	15	8
		Pertokoan Retail & Grosir	70	≤ 4,0	15	6
		Rental Office	70	≤ 4,0	15	10
		Hotel & Jasa Penginapan lainnya	70	≤ 4,0	15	10
		Bank	70	≤ 4,0	15	8
		Pasar	70	≤ 4,0	15	4
KAWASAN LINDUNG	Sarana & Prasarana Lainnya	Taman Kota	10	0,5	70	1
		Kaw. Gelanggang Olahraga	80	3	15	4
	Kws. Perlindungan Setempat	Kws. aneka Industri (Rumah Tangga)	80	1,5	10	3
		Pergudangan	70	1,5	20	3
		Terminal	70	4	20	3
		Station Kereta Api	70	4	20	3
Cagar Budaya & Ilmu pengetahuan Rawan Bencana	Sempadan Sungai					
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			90		
		Inti Pelestarian pada Citra Kota				

Sumber : RTRW Kota Yogyakarta (2014)

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki peraturan mendasar pada pembangunan yakni mematok KDB dengan 70% dan KDH 15% pada fasilitas penginapan serta KDB 80% dan KDH 15% pada fasilitas keolahragaan. Ketinggian bangunan maksimal pada Kota Yogyakarta adalah 10 lantai untuk penginapan dan 4 lantai untuk keolahragaan. Untuk sempadan bangunan Kota Yogyakarta memiliki peraturan bangunan mundur sebesar 5 meter kebelakang.